

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE TRANSPARENCY OF REGIONAL  
FINANCIAL INFORMATION IN REGIONAL GOVERNMENT OF PANGKEP  
DISTRICT**

**Dewi Sari<sup>1,2</sup>**  
**Marwah Yusuf**  
**Asbi Amin**  
**STIE Bongaya Makassar**

Received 12 November 2022  
Revised 14 January 2023  
Accepted 30 March 2023

<sup>1</sup>E-mail : dewisaristiembongaya@gmail.com / <sup>2</sup>Correspondence Author

---

**ABSTRACT**

**Purpose** – This study aims to determine and analyze the presentation of financial, and internal controls that statements, accessibility affect the transparency of regional financial information

**Design/methodology/approach** – This study using quantitative research methods with descriptive statistics

**Findings** – The results of this study indicate: (1) prepare monetary accountability for general purposes (broadly useful fiscal summaries) to build equality of monetary accountability both for funding plans, between periods, and between substances and (2) Inward control is characterized as a cycle that is influenced by a group of head leaders, heads or top administration, other faculties, which is intended to obtain sufficient confirmation about the achievement of goals.

**Originality** – The population in Regency regional apparatus the study in Pangkep district governments These are the entire Pangkep organization, in study is 54 people, device totaling 41 agencies

**Keywords:** Presentation of Financial Statements, accessibility, Internal Control

**Paper Type** Research Result



Contemporary  
Journal on Business  
and Accounting

© Institut  
Transparansi dan  
Akuntabilitas Publik  
(INSPIRING)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PANGKEP**

**Dewi Sari<sup>1,2</sup>**

**Marwah Yusuf**

**Asbi Amin**

**STIE Bongaya Makassar**

<sup>1</sup>E-mail : dewisaristiembongaya@gmail.com / <sup>2</sup>Correspondence Author

---

**ABSTRAK**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyajian keuangan, dan pengendalian intern bahwa pernyataan, aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

**Desain/metodologi/pendekatan** – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan statistik deskriptif

**Temuan** – Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) *Inward control* dicirikan sebagai suatu siklus yang dipengaruhi oleh kelompok pemimpin kepala, kepala atau administrasi puncak, fakultas lain, yang dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi yang cukup tentang pencapaian tujuan, dan (2) Menyiapkan pertanggung jawaban moneter untuk tujuan umum (*broadly useful fiscal summaries*) untuk membangun kesamaan pertanggung jawaban moneter baik terhadap rencana pendanaan, antar periode, maupun antar substansi

**Originalitas** – Populasi pada perangkat daerah Kabupaten yang diteliti di Pemerintah Kabupaten Pangkep adalah seluruh organisasi Pangkep yang diteliti berjumlah 54 orang, perangkat berjumlah 41 instansi.

**Kata-kata Kunci:** Presentasi Laporan Keuangan, *Accessibility*, Pengendalian Internal

**Jenis Artikel** *Research Result*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu jenis gerakan pembukuan wilayah publik diketahui bahwa administrasi publik yang dapat diberikan oleh otoritas publik dalam hal keterusterangan moneter teritorial. Keterusterangan diketahui bahwa salah satu hal penting untuk tanggung jawab manajerial kepada masyarakat umum. Keterusterangan juga merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan akses dan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh data administrasi, termasuk administrasi pendanaan publik (Saputri dan Yuliantoro, 2018).

Ada beberapa penyebab yang berkaitan tingkat keterusterangan moneter lokal, khususnya pengenalan pertanggung jawaban pendanaan. Penjelasan Standar Pembukuan Dinas No. 01 menggambarkan Pengenalan Pertanggung jawaban Anggaran. Motivasi di balik PSAP 01 diketahui bahwa untuk mengontrol pengenalan ringkasan fiskal untuk tujuan umum (ringkasan fiskal yang berguna secara universal) untuk memperluas kesetaraan pertanggung jawaban moneter baik terhadap rencana pengeluaran, antar periode, dan antar substansi.

Elemen berikutnya diketahui bahwa ketersediaan, seperti yang ditunjukkan oleh Asmaul, (2016) yang dapat berkaitan kejelasan data moneter, yaitu keterbukaan spesifik. Keterbukaan ini terkait dengan kemudahan yang dengannya seseorang dapat memperoleh data moneter, di mana setiap kota/dinas atau wilayah memiliki akses data yang mudah. Jelas ini juga kepentingan otoritas publik dalam mengungkapkan data penting yang terkait dengan perincian moneter yang dibuat.

Elemen ketiga diketahui bahwa kontrol ke dalam. Kontrol di dalam menggabungkan konstruksi otoritatif, teknik, dan tindakan yang disusun untuk mengikuti sumber daya hierarkis, benar-benar melihat ketepatan dan keandalan data pembukuan, memberdayakan efektivitas, dan mendukung konsistensi dengan strategi dewan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Menandai Hipotesis**

Hipotesis penandaan atau disebut hipotesis penandaan diketahui bahwa langkah yang dilakukan oleh dewan organisasi yang memberikan arahan kepada pendukung pendanaan tentang bagaimana para eksekutif melihat kemungkinan organisasi. Dalam hipotesis ini diharapkan memberikan garis besar kepada para pendukung pendanaan dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi.

### **Keterusterangan Data Moneter**

Menurut Masrdiamo, (2018:48) Keterusterangan diketahui bahwa daya tanggap otoritas publik dalam membuat strategi moneter wilayah agar dapat diketahui dan dicermati oleh DPRD dan masyarakat pada umumnya. Keterusterangan dalam penyelenggaraan pendanaan provinsi pada akhirnya akan melahirkan tanggung jawab yang seimbang antara dinas wilayah dan kerabatnya sehingga dinas wilayah

yang bersih, kuat, bertanggung jawab dan tanggap diakui keinginan dan kepentingan wilayahnya.

### Menampilkan Pertanggungjawaban Moneter

Proklamasi Standar Pembukuan Dinas No. 01 menggambarkan Pengenalan Pertanggung jawaban Anggaran. Pengenalan ringkasan fiskal mengelola pengenalan pertanggung jawaban anggaran untuk tujuan umum (ringkasan fiskal yang berguna secara universal) untuk memperluas kesetaraan pertanggung jawaban moneter baik terhadap rencana pengeluaran, antar periode, dan antar elemen.

### Ketersediaan

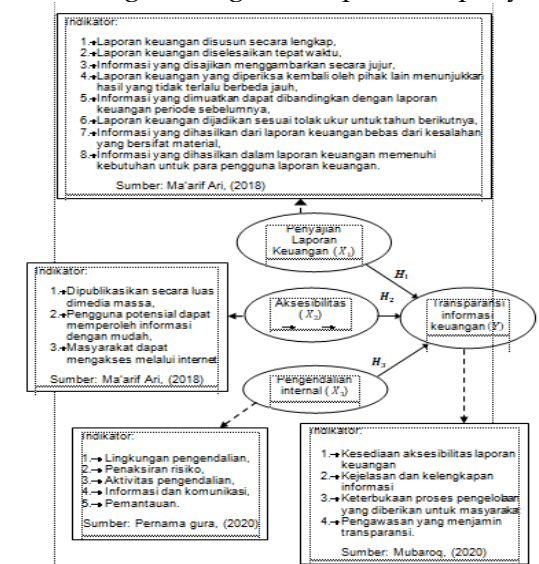
Ketersediaan pertanggung jawaban pendanaan diketahui bahwa kemampuan untuk memberikan izin kepada mitra untuk mengetahui atau memperoleh pertanggung jawaban pendanaan sebagai komponen investasi mitra yang dapat berkaitan kejelasan data pendanaan, khususnya keterbukaan Aliyah, dan Nahar, (2018)

### Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut Wahyudi, (2018) diketahui bahwa siklus yang dipengaruhi oleh pimpinan dewan, eksekutif dan tenaga kerja lain dalam asosiasi yang memberikan konfirmasi yang memuaskan terkait pencapaian tujuan.

### Kajian Teori

Beberapa pemeriksaan sebelumnya telah memimpin penelitian tentang Investigasi Variabel yang Berkaitan Keterusterangan Data Moneter Teritorial. Beberapa pemeriksaan sehubungan dengan dampak dari penyebab-penyebab ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

- H<sub>1</sub>: Pengenalan ringkasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Keterbukaan Data Moneter di DPRD Rezim Pangkep
- H<sub>2</sub>: Keterbukaan berpengaruh terhadap Keterusterangan Data Moneter di DPRD Bagian Pangkep
- H<sub>3</sub>: Kontrol berpengaruh terhadap Keterbukaan Data Moneter di Dinas Provinsi Pangkep

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah Rakyat diketahui bahwa keseluruhan wilayah yang terdiri dari barang/mata pelajaran yang memiliki ciri khusus yang tidak seluruhnya ditempati oleh para ahli untuk dipusatkan dan kemudian diakhiri oleh Sugiyono, (2017:80). Populasi dalam penelitian ini diketahui bahwa seluruh OPD (Persatuan Majelis Perangkat Wilayah) DPRD Rezim Pangkep sebanyak 41 OPD (Perhimpunan Perangkat Wilayah). Metode pengambilan sampel, terdaftar sebagai perwakilan yang berfungsi, baik perwakilan super tahan lama maupun PKWT (pemahaman kerja yang mengikat perwakilan untuk jangka waktu tertentu).

1. Perwakilan yang melakukan pembukuan atau kemampuan organisasi moneter di OPD.
2. Pekerja diketahui bahwa kepala dan staf sub-bidang pembukuan atau organisasi moneter.
3. Mengingat langkah-langkah di atas dan contoh yang diharapkan dari 54 responden dari 18 OPD

**Tabel 1. Data Sampel**

No	Nama OPD	Sampel
1	Dinas kependudukan dan catatan sipil	3
2	Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian	3
3	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang	3
4	Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan	3
5	Dinas perhubungan	3
6	Dinas ketahanan pangan	3
7	Dinas lingkungan hidup	3
8	Dinas pertanian	3
9	Dinas perikanan	3
10	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	3
11	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian	3
12	Dinas ketenagakerjaan	3

13	Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3
14	Dinas pendidikan dan kebudayaan	3
15	Dinas perpustakaan dan kearsipan	3
16	Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga	3
17	Dinas sosial	3
18	Dinas kesehatan	3
<b>Jumlah</b>	<b>18 OPD</b>	<b>54</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Tes Ketergantungan

Tes ketergantungan digunakan untuk mengukur pointer variabel atau build dari survei. Sebuah survei dapat diandalkan atau solid jika jawaban atas pernyataan tersebut dapat diandalkan atau stabil setelah beberapa waktu. Tes ketergantungan yang digunakan diketahui bahwa tes tunggal atau sekali estimasi. SPSS melengkapi kantor untuk mengukur ketergantungan dengan tes terukur Cronbach Alpha. Suatu build atau variabel seharusnya dapat diandalkan jika memberikan Cronbach Alpha > 1,60 dan jika Cronbach Alpha < 1,60 variabel yang dicoba tidak solid.

**Tabel 2. Hasil Tes Ketergantungan Data**

Variabel	Koefisien Realibilitas ( $\alpha$ )	Nilai Batas <i>Cronbach Alpha</i> ( $\alpha$ )	Ket
X1	1,904	1,60	Reliable
X2	1,686	1,60	Reliable
X3	1,856	1,60	Reliable
Y	1,872	1,60	Reliable

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Hasil tes pada tabel 2. menunjukkan kualitas yang tidak tergoyahkan, menunjukkan bahwa X1, X2, X3 dan Y dalam ulasan ini memiliki tingkat kehandalan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil eksperimen di mana nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) setiap variabel di atas 1,60 sehingga dapat diduga bahwa jajak pendapat untuk setiap variabel X1, X2, X3 dan Y dalam penelitian ini akan benar-benar diinginkan, digunakan untuk memperoleh data yang stabil sehingga semua instrumen artikulasi survei menunjukkan kualitas yang tak tergoyahkan dalam memperkirakan penyebab. dalam pemeriksaan ini.

**Tes Kecurigaan**  
**Tesan Biasa**

Tes kebiasaan diketahui bahwa bagian dari tes kebutuhan penyelidikan data atau tes kecurigaan tradisional, di mana sebelum kita melakukan pemeriksaan, data harus diadili untuk penyebaran normal. Alasan untuk mengejar pilihan pada tes kebiasaan diketahui bahwa bahwa dengan asumsi nilainya sangat besar Kolmogorov-Smirnov > 1,05, datanya sering disampaikan. Di sisi lain, dengan asumsi bahwa nilainya kritis Kolmogorov-Smirnov < 1,05 maka data tersebut biasanya tidak diedarkan.

**Tabel 3. Hasil Tesan Biasa**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
	Unstandardized Residual
N	54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean
	.0000000
	Std. Deviation
	1.87718105
Most Extreme Differences	Absolute
	.104
	Positive
	.080
	Negative
	-.104
Test Statistic	.104
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>
<i>a. Test distribution is Normal.</i>	
<i>b. Calculated from data.</i>	
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>	
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>	

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Berdasarkan tabel 3. terlihat bahwa nilai tes faktual yang didapat diketahui bahwa 1,104 di mana nilainya lebih besar dari 1,05 dan Asymp. Sig. (2-tailed) didapat yang setara dengan 1,200 sehingga data tersebut biasa tersampaikan, maka pengtesan kecurigaan atas kebiasaan data tersebut terpenuhi.

**Tes Multikolinearitas**

**Tabel 4. Hasil Tes Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.549	2.723		.202	.841			
	TOTAL_X1	.212	.080	.359	2.655	.011	.591	1.692	
	TOTAL_X2	.414	.179	.282	2.310	.025	.724	1.381	
	TOTAL_X3	.241	.139	.207	1.734	.089	.760	1.316	

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa nilai resiliensi pada pengenalan pertanggung jawaban anggaran (X1) diketahui bahwa sebesar 1,591. Ketersediaan (X2) diketahui bahwa 1,724 dan kontrol dalam (X3) diketahui bahwa 1,760. Sedangkan variabel VIF esteem dalam pengantar ikhtisar fiskal (X1) diketahui bahwa 1,692<11,00. Ketersediaan (X2) sangat besar 1,381<11,00 dan interior control (X3) sangat besar 1,316<11,00 sehingga cenderung beralasan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tes Plausibilitas Model**

**Tabel 5. Tes Plausibilitas Model (F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.386	3	53.129	14.224	.000 <sup>b</sup>
	Residual	186.762	50	3.735		
	Total	346.148	53			

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X2, TOTAL\_X1

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan F hitung dengan besar 1,05 diperoleh F bagan senilai 2,542 (nilai ini diperoleh dari Microsoft Succeed = FINV (5%, 4,54). Artinya nilai F hitung > F bagan diketahui bahwa 14,224 > 2,542 bahwa model eksplorasi dapat dicapai atau fit.

**Tes Parsial (T)**

**Tabel 6. Hasil Tes Parsial (T)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.549	2.723		.202	.841
TOTAL_X1	.212	.080	.359	2.655	.011
TOTAL_X2	.414	.179	.282	2.310	.025
TOTAL_X3	.241	.139	.207	1.734	.089

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Berdasarkan bagan 5.16 data yang ditentukan dengan menggunakan SPSS 23 Show of Budget Reports (X1) didapat sebesar hitung = 2,655 nilai sementara bagan = 2,004 (Nilai ini diperoleh dari Microsoft Succeed = TINV (5%,54), diberhentikan dengan alasan nilai t hitung > t bagan = 2,655 > 2,004. Keterbukaan (X2) diperoleh sebesar hitung = 2,310 sementara nilai t bagan = 1,67. Hal ini berarti H0 ditolak karena nilai t hitung > t bagan=2,310>2,004. Kontrol Interior (X3) didapatkan sebesar hitung=1,734 nilai sementara t bagan = 2,004. Hal ini berarti H0 diterima karena nilai t hitung < t bagan = 1,734 < 2,004.

**Tes Koefisien Determinasi (Rsquare)**

**Tabel 7. Hasil Tes Koefisien Deteminasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 <sup>a</sup>	.460	.428	1.933

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X2, TOTAL\_X1

b. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: Hasil SPSS 23, Data Penting (2022)

Berdasarkan tabel 7. diketahui nilai R Square 1,460. Mengingat nilai R Square, tingkat 46% dari variabel Keterbukaan Data Moneter dapat diperoleh yang dibuat masuk akal oleh Presentasi Laporan Keuangan, Keterbukaan, dan *Inward Control*. Sedangkan penyebab-penyebab di luar Presentasi Laporan Keuangan, Keterbukaan, dan *Inward Control* sebesar 54% (100 persen - 46%).

## Pembahasan

### Presentasi Pertanggungjawaban Fiskal berkaitan Keterusterangan Data Moneter

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menyiapkan pertanggung jawaban moneter untuk tujuan umum (*broadly useful fiscal summaries*) untuk membangun kesamaan pertanggung jawaban moneter baik terhadap rencana pendanaan, antar periode, maupun antar substansi.

Dilihat dari hasil perhitungan Multiple Relapse Test, Show of Budget Report (X1) didapatkan tanda=1,011 tingkat kritis sementara senilai  $\alpha=1,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak karena tanda < taraf signifikan  $\alpha=1,011 < 1,05$ . Nilai sementara diperoleh dengan nilai t hitung=2,655 dan nilai t bagan=2,004 (nilai ini diperoleh dari Microsoft Succeed = TINV ( 5% .54) ). Dari hasil penyelidikan tes t diketahui nilainya t hitung > t bagan=2,655 > 2,004. Cenderung diduga bahwa Pengenalan Ikhtisar Fiskal (X1) berpengaruh terhadap Keterusterangan Data Moneter (Y ) Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengenalan pertanggung jawaban pendanaan wilayah akan semakin menjelaskan rincian administrasi moneter dinas provinsi karena semua pertukaran dilakukan sesuai pedoman yang ada dan diperkenalkan secara total dan adil, sehingga pertanggung jawaban administrasi pendanaan wilayah akan lebih baik. mudah.

Dalam hipotesa yang lesu dikatakan bahwa dinas wilayah menyampaikan data yang dibantu oleh organisasi melalui pertanggung jawaban pendanaan untuk memberikan manfaat serta bentuk tanggung jawab dinas wilayah kepada wilayah.

Hasil ini sesuai dengan pengtesan yang dipimpin oleh Masyhur, (2017) dan Ndoka (2020) yang mengatakan bahwa pengenalan pertanggung jawaban moneter sangat berkaitan kejelasan data moneter karena dapat diduga bahwa pengenalan moneter teritorial lebih baik. pertanggung jawaban, maka akan semakin jelas perincian administrasi pendanaan dinas wilayah karena semua transaksi dilakukan sesuai pedoman yang ada dan disajikan secara lengkap dan sah, sehingga pertanggung jawaban administrasi pendanaan provinsi akan lebih lugas dan bertanggung jawab. Hal ini karena pertanggung jawaban pendanaan provinsi memuat data yang cukup untuk melihat konsekuensi penggunaan RAPBN oleh dinas wilayah dalam mengawasi dana wilayah. Bagaimanapun, eksplorasi ini bertentangan dengan penelitian yang dipimpin oleh Yuliani (2017) dan (Sari, 2017) yang menyatakan bahwa pengenalan pertanggung jawaban moneter secara signifikan berkaitan kejelasan data moneter.

### Keterbukaan berpengaruh terhadap Keterusterangan Data Moneter

Keterbukaan pertanggung jawaban pendanaan diketahui bahwa kemampuan untuk memberikan izin kepada rekanan untuk mengetahui atau mendapatkan pertanggung jawaban pendanaan sebagai salah satu komponen dukungan rekanan yang dapat berkaitan kelancaran data pendanaan.

Berdasarkan estimasi Tes Relaps Berbeda, Keterbukaan (X2) mendapat tanda = 1,025 tingkat besar sementara senilai  $\alpha = 1,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai tanda < taraf signifikan  $\alpha=1,025 < 1,05$ . Sedangkan diperoleh nilai t

hitung=2,310 dan nilai bagan=2,004 (Nilai ini didapat dari Microsoft Succeed = TINV (5%,54). Dari data investigasi tes t diperoleh nilai t hitung > t bagan = 2,310 >2,004 Dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Keterbukaan Data Pendanaan (Y) Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada pengguna pertanggung jawaban pendanaan akan membuat kelancaran dan pengelolaan pendanaan wilayah menjadi lebih baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPRD setempat.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2017), (Masyhur, 2017), (Ndoka, 2020), dan (Ledo dan Ayem, 2017) yang mengatakan bahwa keterbukaan berkaitan keterbukaan data pendanaan karena faktanya itu. Hal ini cenderung dianggap bahwa memberikan akses mudah kepada klien pertanggung jawaban pendanaan akan membuat kejelasan dan tanggung jawab untuk administrasi pendanaan provinsi yang lebih baik dan membangun kepercayaan publik di negara-negara tetangga. Hal ini didukung oleh kemampuan masing-masing OPD untuk memberikan izin masuk yang sederhana dan jelas kepada setiap klien pertanggung jawaban pendanaan provinsi yang membutuhkannya. Bagaimanapun, kajian ini berlawanan dengan penelitian yang dipimpin oleh (Yuliani, 2017) yang menyatakan bahwa pengenalan pertanggung jawaban moneter berkaitan kejelasan data moneter.

#### ***Inward Control Berpengaruh Signifikan Terhadap Keterusterangan Data Moneter***

Inward control dicirikan sebagai suatu siklus yang dipengaruhi oleh kelompok pemimpin kepala, kepala atau administrasi puncak, fakultas lain, yang dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi yang cukup tentang pencapaian tujuan.

Berdasarkan estimasi Tes Relaps Beda, Kontrol Dalam (X3) mendapat tanda=1,089tingkat kritis sementara senilai  $\alpha=1,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diakui dengan alasan sifat singkat tanda>taraf signifikan  $\alpha=1,089>1,05$ .diperoleh nilai t hitung=1,734 dan nilai bagan=2,004 (Nilai ini diperoleh dari Microsoft Succeed = TINV ( 5%, 54) Dari data investigasi tes-t, t hitung<t bagan=1,734<2,004 sangat mungkin beralasan Inside Control (X3) tidak ada bedanya dan tidak besar terhadap Monetary Data Straightforwardness (Y). hasil harus terlihat terkait dengan pernyataan survei X3.2 yang menyatakan bahaya dibedakan kemudian dikontraskan dengan tingkat ketahanan kebetulan yang ditentukan sebelumnya, ada 1 responden dengan tingkat tingkat 1,8% yang menjawab berbeda dan 9 responden dengan tingkat dari 16,6% yang menjawab netral.Hal ini menunjukkan bahwa otoritas publik benar-benar memberikan sedikit perhatian terhadap evaluasi perjudian dari gerakan dinas lingkungan.Jika strategi evaluasi perjudian tidak dijalankan dengan benar, otoritas publik Ritas tidak dapat menilai mengambil kesempatan dalam suatu tindakan yang telah dilakukan atau suatu gerakan yang belum dilakukan. Jika OPD tidak memberikan penilaian taruhan dan taruhan sistem dewan tidak dijalankan seperti yang diharapkan untuk tindakan yang dilakukan

oleh suatu zat maka itu tidak berdaya melawan pencemaran atau pemerasan lainnya.

Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Ledo dan Ayem, (2017) yang menyatakan bahwa *inside control* berkaitan keterusterangan data moneter. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dipimpin oleh Yuliani (2017) dan (Masyhur, 2017) yang menyatakan bahwa *inward control* berkaitan keterusterangan data moneter. Apabila *inside control* dalam pengawasan dana provinsi dapat dilakukan dengan baik, maka pada saat itu seluruh pekerja atau aset yang dimiliki oleh OPD dapat berjalan dengan benar untuk membentuk dan membuat pertanggung jawaban pendanaan yang solid dan berguna.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada pengujian hasil dan analisis data serta pembahasan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban fiscal berpengaruh terhadap keterusterangan data moneter. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengenalan pertanggung jawaban pendanaan wilayah akan semakin menjelaskan rincian administrasi moneter dinas provinsi karena semua pertukaran dilakukan sesuai pedoman yang ada dan diperkenalkan secara total dan adil, sehingga pertanggung jawaban administrasi pendanaan wilayah akan lebih baik.
- b. Keterbukaan berpengaruh terhadap keterusterangan data moneter. Keterbukaan pertanggung jawaban pendanaan diketahui bahwa kemampuan untuk memberikan izin kepada rekanan untuk mengetahui atau mendapatkan pertanggung jawaban pendanaan sebagai salah satu komponen dukungan rekanan yang dapat berkaitan kelancaran data pendanaan.
- c. *Inward Control* berpengaruh signifikan terhadap keterusterangan data moneter. Apabila *internal control* dalam pengawasan dana provinsi dapat dilakukan dengan baik, maka pada saat itu seluruh pekerja atau aset yang dimiliki oleh OPD dapat berjalan dengan benar untuk membentuk dan membuat pertanggungjawaban pendanaan yang solid dan berguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti , Nahar, A. (2018). Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah DI Wilayah JEPARA. Buku Harian Pembukuan dan Pemeriksaan , 8 (2), 97-189.
- Asmaul, A. (2016). Dampak Kualitas Dinasan Lingkungan terhadap Pelaksanaan Moneter Dinasan Sekitar (Konsentrasi pada Rezim/Badan Legislatif Wilayah di Jawa Timur) . ADA.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Tesan Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (Versi Kede). Perguruan Tinggi Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Tesan Multivariat SPSS 25 . Perguruan Tinggi Diponegoro.
- Ledo, D., dan Ayem, S. (2017). Dampak Sudut Pandang Administrasi Moneter Provinsi terhadap Kelancaran Administrasi Moneter Wilayah. STIE Ilmu Bisnis Widya Wiwaha , 25 (2), 161-175. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236>
- Ma'arif Ari, L. (2018). dampak pemberlakuan pertanggung jawaban pendanaan wilayah dan keterbukaan pertanggung jawaban pendanaan provinsi terhadap kelancaran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendanaan wilayah di tempat kerja dan organisasi Perda Ponorogo
- Makkalau, MFW (2008). sejarah kekarraengan di pangkep . perpustakaan refleksi.
- Masrdiamo. (2018). kemandirian wilayah dan administrasi moneter (mardiasmo (ed.); terbaru). ANDI Yogyakarta.
- Masyhur, M. (2017). Dampak Tampilan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah Provinsi, Ketersediaan Rangkuman APBD dan Pengendalian Dalam Negeri terhadap Keterbukaan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah Kota Dumai. Buku Harian Online Mahasiswa Bidang Ketenagakerjaan Bidang Pendanaan, Sekolah Tinggi Riau, 4(1), 1179-1192.
- Medina, dan Rufin. (2015). Strategi Keterusterangan dan Pemenuhan dan Kepercayaan Siswa. Mengubah Dinas. Vol. 9 No. , 309-323.
- Mubarok, AF (2020). Dampak Keterusterangan Rencana Pendanaan Aset Kota Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kota.
- Ndoka, AT (2020). PENGARUH KEBERADAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DAN KETERBUKAAN PERTANGGUNG JAWABAN

PENDANAAN TERHADAP KELUARGA DAN TANGGUNG JAWAB PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN PENGELOLA PERTANGGUNG JAWABAN PENDANAAN DI WILAYAH ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (hlm. 1-9).  
<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/4733>

Nico, A. (2007). Keterusterangan Dan Tanggung Jawab Publik Melalui E-Government. Bayumedia Mendistribusikan.

Nurbaiti Fawziah, I., dan Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Unique Income Teritorial, General Allotment Asset, Exceptional Distribution Asset, dan Proporsi Pendanaan Wajib terhadap Keterusterangan Data Moneter Wilayah Melalui Situs. *Buku Harian Penjelajahan* , 2 (1), 2200-2213.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.207>

Nama Gura, Ade. (2020). dampak inside control pada kerangka data pembukuan berkaitan sifat pertanggung jawaban moneter (penyelidikan kontekstual di divisi uang PT. pos Indonesia).

Pitri, DP, Verawaty, dan Merina, CI (2017). Penentu Keterbukaan Data Moneter Wilayah Melalui E-Government Wilayah/Dinas Wilayah di Wilayah Sumatera Selatan. *Tata Cara Workshop Hasil Eksplorasi FEB UBD* , 3 , 1-16.  
<http://eprints.binadarma.ac.id/3671/>

Salle, A. (2017). Signifikansi Keterusterangan dalam Administrasi Moneter Wilayah. *KEUDA (Buku Harian Investigasi Moneter dan Moneter Lokal)*, 1 (1), 1-19.  
<https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>

Saputri, W., dan Yuliantoro, R. (2018). Investigasi variabel-variabel yang berkaitan kejelasan data moneter lokal melalui situs. *Diskusi Publik Lampung XIX tentang Pembukuan* , 2012 , 1-26. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/099.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/099.pdf)

Sari, EW (2017). Pengaruh Kerangka Kontrol Orang Dalam, Tampilan Rangkuman Anggaran, Keterbukaan Pertanggung jawaban Moneter dan Gaya Administrasi terhadap Keterusterangan dan Tanggung Jawab Administrasi Moneter Wilayah di Rezim Indragiri Hulu. *JOMFekom* , 4 (1), 571-586.  
[https://media.neliti.com/media/distributions/125589-ID-investigation dampak-pemekaran-region-ditinja.pdf](https://media.neliti.com/media/distributions/125589-ID-investigation-dampak-pemekaran-region-ditinja.pdf)

Shafratunnisa, F. (2015). Pemanfaatan Standar Keterbukaan dan Tanggung Jawab Dalam Administrasi Moneter Kepada Mitra di SD Islam Binakheir . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sugiyono. (2017). Strategi Eksplorasi Instruktif: Pendekatan Kuantitatif, Subyektif, dan Penelitian dan Pengembangan. Set surat.
- Sugiyono. (2019). Strategi PENELITIAN Kuantitatif, Subjektif, dan Penelitian dan Pengembangan . Set surat.
- Tuanakotta, TM (2014). Penalaran Tegas Dalam Mengevaluasi. Salemba Empat.
- penyingkapan. (2018). kontrol halus bagian dari humanisme dalam kerangka kontrol dalam. inventif diandra.
- Wati, SW, S, YC, dan Fajri, RN (2020). Kajian Perancangan Modal pada Organisasi Sub Bidang Properti dan Tanah dengan Organisasi Sub Bidang Pembangunan dan Bangunan. *Jae: Catatan Harian Pembukuan Dan Pendanaan* , 6 (1), 26-36. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14118>
- Yuliani, NL (2017). Dampak Tampilan Rangkuman Anggaran, Atribut Subjektif, Keterbukaan dan Kontrol Orang Dalam terhadap Keterbukaan Pertanggung jawaban Pendanaan Dinas Lingkungan. *Buku Harian Aspek Bisnis dan Pendanaan (JBE)* , 24(1),1-